



## PENGUATAN TATA KELOLA PENANGANAN ANAK RENTAN DAN TIDAK SEKOLAH MELALUI KEBIJAKAN TERPADU DI KOTA PEKALONGAN

Agus Wahyudi<sup>1</sup>, Mustofa Anshori Lidinillah<sup>2</sup>, Hendro Muhaimin<sup>3</sup>, Rona Utami<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 4</sup> Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

<sup>3</sup> Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada

Email: [awahyudi@ugm.ac.id](mailto:awahyudi@ugm.ac.id)<sup>1</sup>, [mustofalidinillah@ugm.ac.id](mailto:mustofalidinillah@ugm.ac.id)<sup>2</sup>, [hendro.muhamin@gmail.com](mailto:hendro.muhamin@gmail.com)<sup>3</sup>, [ronautami@ugm.ac.id](mailto:ronautami@ugm.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

*Education is a fundamental right guaranteed by the constitution for every citizen. However, in Pekalongan City, a significant challenge persists: many children lack access to quality education due to economic, social, and other constraints. The issues of Out-of-School Children (OSC) and those vulnerable to dropping out remain pressing problems that demand serious attention from the government and stakeholders. This study employs a qualitative approach with an ethnographic method to explore these issues in depth. The ethnographic approach facilitates a thorough examination of local innovations addressing OSC in Pekalongan City, including identifying the roles of key stakeholders. The research aims to uncover best practices and assess the sustainability of current educational initiatives. Focus group discussions (FGDs) are conducted with stakeholders such as the Pekalongan City Development Planning Agency (Bappeda) for policy alignment and the Pekalongan City Education Office for technical implementation. This study identifies the strategies and policies already implemented, emphasizing the importance of cross-sector collaboration and active participation from stakeholders to build an inclusive and equitable education system. The findings of this research highlight the necessity of a collective commitment from the government, educational institutions, communities, and individuals to address these challenges. This shared effort is essential to achieving the vision of inclusive and high-quality education in Pekalongan City.*

**Keywords:** *Out-of-School Children (OSC), Policy Governance, Inclusive Education, Equity in Education*

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen penting bagi suatu bangsa sekaligus amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai hak asasi setiap warga negara, pendidikan memiliki peran krusial dalam menjamin keberhasilan serta keberlanjutan pembangunan nasional. Hal ini dipertegas dalam Pasal 31 UUD 1945, ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” dan ayat (2) yang menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Pendidikan merupakan hak dasar bagi semua warga negara dan bukan hak istimewa bagi sekelompok masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kondisi dasar yang dibutuhkan dari pembangunan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia salah satunya diawali dari akses terhadap pendidikan dasar yang setara bagi semua.<sup>1</sup> Pendidikan menjadi modalitas dalam mendorong kualitas tenaga kerja yang produktif, yang pada akhirnya diharapkan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam lapangan kerja, memperoleh upah yang layak, serta akhirnya berkesempatan untuk meningkatkan status sosial ekonomi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Haskins, R. (2013, May 13). *Three Simple Rules Poor Teens Should Follow to Join The Middle Class*. [https://www.brookings.edu/opinions/three-simple-rules-poor-teens-](https://www.brookings.edu/opinions/three-simple-rules-poor-teens-should-follow-to-join-the-middle-class/)

[should-follow-to-join-the-middle-class/](https://www.brookings.edu/opinions/three-simple-rules-poor-teens-should-follow-to-join-the-middle-class/)

<sup>2</sup> Ford Foundation & Prakarsa. (2015). *Multidimensional Poverty Index Indonesia 2012-2014: Executive Summary*.

Melihat data nasional, Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap peningkatan kualitas hidup rakyatnya, termasuk melalui peningkatan akses layanan pendidikan dasar bagi semua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat penyelesaian pendidikan Sekolah Dasar (SD) menjadi 94 persen (2024) dari 91,8 persen, dan penuntasan pendidikan menengah pertama menjadi 89,49 persen dari 81,7 persen. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam aksi global capaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana pendidikan yang inklusif dan merata serta kesempatan belajar seumur hidup bagi semua warga negara menjadi salah satu tujuannya (Target 4).<sup>3</sup>

Berdasarkan kajian di Kota Pekalongan, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganannya memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga nonpemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal. Sampai tahun 2021 ada 13 PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan nonformal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan nonformal.<sup>4</sup>

Faktor ekonomi dan konteks sosial masih menjadi kendala dalam upaya memastikan seluruh anak mengenyam pendidikan dasar. Susenas 2017 telah mengidentifikasi penyebab anak putus sekolah. Faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar, baik disebabkan ketiadaan biaya (28,5 persen) ataupun anak yang bekerja (20,6 persen). Konteks ekonomi semakin terlihat dengan semakin tingginya angka putus sekolah

anak khususnya dari keluarga miskin dan tinggal di daerah pedesaan. Konteks sosial yang teridentifikasi dan menjadi kendala adalah persepsi bahwa pendidikan anak saat itu sudah cukup (8,4 persen), menikah dini (6,9 persen), dan anak dengan disabilitas (2 persen). Apabila dipilah berdasarkan jenis kelamin, risiko anak perempuan untuk putus sekolah lebih tinggi daripada anak laki-laki. Selain itu, proporsi ATS yang bekerja lebih tinggi pada anak laki-laki, sedangkan proporsi ATS karena menikah lebih tinggi pada anak perempuan.<sup>5</sup>

Pemerataan layanan pendidikan sudah relatif baik yang ditandai oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) yang relatif tinggi, terutama pada jenjang dasar, yaitu SD/MI 106,32%, SMP/MTs 92,06%, SMA/SMK/MA 84,53%, dan Pendidikan Tinggi 30,58% (Susenas 2020).<sup>6</sup> Namun demikian, masih terdapat masalah penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak menempuh pendidikan di sekolah yang jumlahnya mencapai lebih dari empat juta anak. Hal ini disebabkan tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal. Selain kondisi geografis, beberapa masalah perlu ditanggulangi dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab ATS, antara lain, isu anak bekerja, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, dan anak/remaja dalam pernikahan. Dengan demikian, diharapkan layanan pendidikan menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Data ATS di Kota Pekalongan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil validasi awal antara Dindikcapil, Dinas Pendidikan, dan Kelurahan pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1.195 anak masuk dalam kategori ini. Upaya penanganan yang telah dilakukan meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), verifikasi lapangan, serta program pengembalian anak ke sekolah. Dalam proses reintegrasi tersebut,

[https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/IndonesiaMPI\\_12\\_15\\_ExecSum.pdf](https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/IndonesiaMPI_12_15_ExecSum.pdf)

<sup>3</sup> Lihat Bab 4 pada RPJMN 2020–2024 tentang *Sasaran Utama Terpenuhi Layanan Dasar*, Indikator Nomor 23.

<sup>4</sup> Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023, *Evaluasi Hasil*

*Triwulan II Tahun 2023*, Halaman 146.

<sup>5</sup> Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2017-2019.

<sup>6</sup> Ibid. SUSENAS Tahun 2017-2019.

Pemerintah Kota Pekalongan memerlukan tinjauan dari perspektif anak, sehingga penanganan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Upaya pengembalian ke jalur pendidikan, baik formal maupun informal, diharapkan berjalan efektif melalui observasi lapangan yang memperhatikan faktor sosial, ekonomi, hingga psikologis yang memengaruhi kesiapan anak untuk kembali bersekolah.

**Tabel 1. Data ATS Kota Pekalongan Hasil Validasi Awal Dindukcapil, Dinasdik dan Kelurahan (2024)**

No	Kecamatan	Validasi Capil	Validasi Dindik (Bersekolah)	Validasi Kelurahan				Sisa ATS	Sudah Dianalisis	Belum Dianalisis
				Sekolah	Santri	Meninggal	Tdk Ketemu			
1	Kecamatan Pekalongan Barat	466	80	28	56	2	16	284	284	Pilih Kec
2	Kecamatan Pekalongan Selatan	483	72	20	100	3	18	270	229	Pilih Kec
3	Kecamatan Pekalongan Timur	373	63	22	41	1	10	236	205	Pilih Kec
4	Kecamatan Pekalongan Utara	605	111	19	35	2	33	405	405	Pilih Kec
Jumlah		1,927	326	89	232	8	77	1,195	1,123	72

Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Berdasarkan data (Tabel 1.1), Kota Pekalongan menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka ATS dengan total 1.195 anak yang masih belum kembali ke bangku sekolah. Dari empat kecamatan, Pekalongan Utara memiliki jumlah ATS tertinggi dengan 405 anak, disusul oleh Pekalongan Barat (284 anak), Pekalongan Selatan (270 anak), dan Pekalongan Timur (236 anak). Hasil validasi menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tidak bersekolah menghadapi kendala ekonomi, jarak sekolah yang jauh, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Masalah ini diperparah dengan kondisi di beberapa wilayah pesisir, di mana anak-anak sering kali terdorong untuk bekerja membantu perekonomian keluarga daripada melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data dan fenomena tersebut, telah tergambarkan bahwa sebaran ATS di Kota Pekalongan dari sisi jumlahnya dinilai cukup merata, hanya pada Kecamatan Pekalongan Utara saja yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan wilayah yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh biaya operasional pribadi yang cukup tinggi, ada pengaruh dari pribadi yang harus bekerja, dan adanya ketidakmampuan membayar sekolah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dipilih dalam proses penelitian untuk menelusuri proses implementasi dari empat inovasi lokal penanganan ATS yang disertai dengan pemetaan peran dari para pelaku terkait. Hammersley (1990) menyatakan tiga prinsip metodologi yang digunakan dalam corak metode etnografi, yaitu<sup>7</sup>:

- Naturalisme, bagian ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan melalui intervensi atau rekayasa eksperimen.
- Pemahaman, bagian ini yang menjadi landasan utama adalah bahwa tindakan manusia berbeda dari perilaku objek fisik. Tindakan tersebut tidak hanya tanggapan stimulus namun juga interpretasi terhadap suatu stimulus. Untuk itu meneliti latar budaya yang lebih dikenal lebih baik dari pada meneliti yang masih asing agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya.
- Penemuan, bagian ini menegaskan bahwa penelitian etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasarkan pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan namun menjadi nyata setelah dibuktikan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut.

Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi praktik baik beserta pembelajaran yang dapat dipetik untuk keberlanjutan inovasi tersebut ataupun inovasi serupa lainnya. Pada tahap awal akan diselenggarakan lokakarya dengan pelaku kebijakan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan daerah (Bappeda) untuk koordinasi kebijakan dan Dinas Pendidikan untuk teknis pelaksanaan. Lokakarya ini ditujukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap kerangka dan instrumen penelitian, untuk memastikan keselarasan

<sup>7</sup> Dalam Genzuck (2005: 3) yang tersaji dalam buku Emzir "Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif"

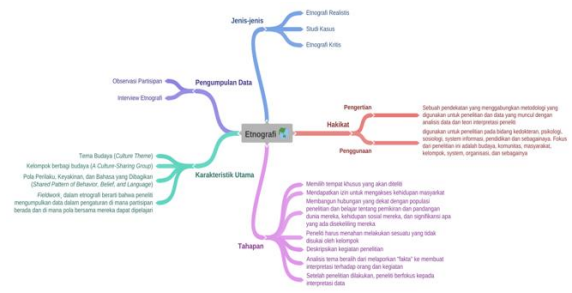
(2011:149-152).

dengan kebutuhan serta meningkatkan kualitas analisis.

Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan dua metode yaitu diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara terstruktur dengan dua kelompok utama yang berperan, yaitu penyedia layanan (*supply side*) dan penerima manfaat (*demand side*). Dari sisi penyedia layanan, terdapat sejumlah instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis. Bapperlitbangda berperan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan formal maupun nonformal, Dinas Kependudukan menyediakan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan, Dinas Sosial mendukung aspek perlindungan sosial bagi anak dan keluarga rentan, sedangkan Dinas Kesehatan memastikan terpenuhinya kebutuhan kesehatan anak sebagai salah satu faktor penting dalam keberlangsungan pendidikan.

Sementara itu, dari sisi penerima manfaat, terdapat berbagai lembaga pendidikan nonformal yang menjadi ruang alternatif pembelajaran bagi anak. Di antaranya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta pondok pesantren, yang memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap memperoleh akses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. pelaksana.

Data primer ini kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang mencakup regulasi dan kebijakan ATS, dokumen-dokumen inovasi penanganan ATS ataupun lainnya, beserta data terkait pendidikan dasar. Proses pemilihan narasumber utama menggunakan *snowball sampling* terkait untuk membantu mengidentifikasi narasumber yang sesuai dengan kriteria pendokumentasian. Secara umum, narasumber utama terbagi ke dalam kelompok (a) penyedia layanan (*supply side*) yaitu pembuat kebijakan baik di tingkat pusat ataupun daerah, dan (b) penerima manfaat (*demand side*) layanan pendidikan yaitu orang tua dari ATS.



**Diagram 1. Alur Studi Etnografi**

Sumber: <https://coggle-downloads-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/>

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan (Juni-Desember 2024) dimulai dari proses penyiapan proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuisioner, dan melakukan uji validitas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang digunakan, setelah itu baru menganalisa data dan penulisan laporan.



**Diagram 2. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian ini adalah menemukan penyebab ATS melalui pendekatan etnografi. Selain itu penelitian ini diupayakan untuk mengetahui metode penanganan ATS yang tepat sasaran sesuai dengan penyebab dan kebutuhannya. Untuk lebih detail dapat dilihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Daftar Narasumber**

Subjek	Pelaksana Kebijakan	Pelaksana Pembelajaran
Penyedia Layanan ( <i>Supply Side</i> )	- Bapperlitbangda - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan	- SKB - PKBM - Pondok Pesantren
Penerima Manfaat ( <i>Demand Side</i> )	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan	

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi ATS Berdasarkan Kewilayahan di Kota Pekalongan

Analisis penyebab ATS di Kota Pekalongan berdasarkan aspek kewilayahan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, adanya



variasi karakteristik dan tantangan khusus di masing-masing kecamatan, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Setiap kecamatan memiliki faktor penyebab ATS yang unik, dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, budaya, aksesibilitas, serta dukungan keluarga terhadap pendidikan.

**Tabel 3. Analisis Penyebab ATS Berdasarkan Aspek Kewilayahan**

Pekalongan Barat			Pekalongan Timur			Pekalongan Utara			Pekalongan Selatan		
284			236			405			270		
No	Kelurahan	Jml. Persen	No	Kelurahan	Jml. Persen	No	Kelurahan	Jml. Persen	No	Kelurahan	Jml. Persen
1.	Pringrejo	65	1.	Setono	51	1.	Degayu	71	1.	Jenggot	73
2.	Pasirkratonkramat	55	2.	Noyontaansari	48	2.	Krayak	67	2.	Banyurip	56
3.	Sapuro Kebulen	45	3.	Poncol	45	3.	Panjang Baru	65	3.	Kuripan Yosoropo	51
4.	Tirto	37	4.	Klego	39	4.	Kandang Panjang	60	4.	Buaran Kradenan	40
5.	Medono	31	5.	Kauman	21	5.	Bandengan	56	5.	Kuripan Kersaharjo	29
6.	Bendan Kergon	30	6.	Gamer	19	6.	Panjang Wetan	45	6.	Sokoduwet	21
7.	Podosugh	21	7.	Kali Baros	13	7.	Padukahan Kraton	41			

Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Berdasarkan data dari Kota Pekalongan, analisis penyebab ATS dapat dilihat dari aspek kewilayahan yang dibagi menjadi empat kecamatan, yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Setiap kecamatan menunjukkan jumlah dan karakteristik penyebab ATS yang berbeda di setiap kelurahannya. Berikut adalah analisis lebih rinci mengenai masing-masing kecamatan dan kelurahan yang terdapat dalam data ini.

### 1. Kecamatan Pekalongan Barat

Kecamatan Pekalongan Barat merupakan wilayah dengan beragam latar belakang ekonomi dan sosial, tetapi terdapat banyak keluarga berpenghasilan rendah yang masih mengandalkan pekerjaan informal. Kondisi ini membuat anak-anak di wilayah ini rentan untuk keluar dari sistem pendidikan formal dan bekerja membantu ekonomi keluarga. Di Kecamatan Pekalongan Barat terdapat 284 ATS, ditunjukkan Kelurahan dengan ATS Tertinggi berada di Kelurahan Pringrejo (65 anak), Pasirkratonkramat (55 anak), Sapuro Kebulen (45 anak). Selain faktor ekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekerja, kurangnya motivasi dari keluarga dan pola pikir yang kurang mengutamakan pendidikan juga berperan besar. Dalam beberapa kasus, anak-anak tidak melihat relevansi antara pendidikan formal dan perbaikan kesejahteraan keluarga mereka.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius di beberapa kelurahan yang mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi rendah, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, serta akses ke fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Di wilayah ini, masalah ekonomi memainkan peran besar. Banyak keluarga yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan informal atau industri kerajinan, sehingga anak-anak sering kali dilibatkan dalam pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu, beberapa kelurahan di Pekalongan Barat mungkin masih menghadapi kendala aksesibilitas dan fasilitas sekolah yang belum optimal sehingga anak-anak enggan bersekolah.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain:

#### a) Program Pemberdayaan Ekonomi

Pemerintah daerah perlu meluncurkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah, terutama di kelurahan dengan tingkat ATS tinggi seperti Medono dan Pringrejo. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau bantuan ekonomi langsung.

#### b) Pendidikan Kesadaran Keluarga

Program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan juga dibutuhkan. Melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan dalam kegiatan penyuluhan dapat membantu mengubah pandangan orang tua yang lebih mengutamakan anak bekerja daripada bersekolah.

#### c) Pengembangan Infrastruktur Sekolah

Pembangunan atau peningkatan fasilitas sekolah di beberapa kelurahan dapat membantu menarik minat anak untuk kembali bersekolah. Fasilitas yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

### 2. Kecamatan Pekalongan Timur

Kecamatan Pekalongan Timur mencatat 236 anak yang tidak bersekolah. Kelurahan dengan ATS Tertinggi: Setono (51 anak), Noyontaansari (48 anak), Poncol (45 anak), Klego (39 anak), Kauman (21 anak), Gamer (19 anak), Kali Baros (13 anak). Pekalongan Timur memiliki karakteristik yang berbeda dari

Pekalongan Barat, dengan beberapa daerah yang relatif lebih maju secara ekonomi namun tetap menghadapi tantangan dalam aspek sosial dan motivasi anak. Di wilayah ini, pergaulan dan kurangnya motivasi untuk bersekolah tampaknya menjadi penyebab utama ATS. Lingkungan yang memungkinkan anak-anak lebih memilih kegiatan selain sekolah, ditambah pengaruh teman sebaya yang kurang mendukung pendidikan, membuat anak-anak di wilayah ini mudah kehilangan minat untuk belajar. Di beberapa kelurahan seperti Poncol dan Klego, anak-anak mungkin merasa bahwa mereka dapat bekerja lebih awal tanpa perlu menyelesaikan pendidikan.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain:

- a) **Program Bimbingan dan Konseling Sekolah**  
Setiap sekolah di Kecamatan Pekalongan Timur perlu memiliki program bimbingan dan konseling yang kuat untuk membantu anak-anak mengatasi masalah motivasi dan pergaulan negatif. Konselor dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan dukungan khusus bagi siswa yang berisiko putus sekolah.
- b) **Kegiatan Ekstrakurikuler dan Bimbingan Karir**  
Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan program bimbingan karir dapat membantu anak-anak memahami pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Ini bisa berupa kunjungan ke industri, lokakarya keterampilan, atau pengenalan profesi yang membuat anak-anak melihat pentingnya pendidikan dalam meraih kesuksesan.
- c) **Keterlibatan Komunitas dan Program Pemuda**  
Melibatkan komunitas dan organisasi pemuda dalam kegiatan positif akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Pembentukan klub belajar atau kelompok pemuda yang menekankan pentingnya pendidikan dapat membantu mengatasi pergaulan negatif di kalangan anak-anak.

### **3. Kecamatan Pekalongan Utara**

Kecamatan Pekalongan Utara memiliki 405 anak yang tidak bersekolah dan yang tertinggi di Kota Pekalongan. Kelurahan dengan ATS tertinggi, yaitu Degayu (71 anak), Krapyak (67 anak), Panjang Baru (65 anak), Kandang Panjang (60 anak), Bandengan (56 anak), Panjang Wetan (45 anak), dan Padukuhan Kraton (41 anak). Wilayah ini adalah wilayah pesisir yang banyak penduduknya bekerja di sektor perikanan dan pekerjaan informal lainnya. Banyak keluarga di wilayah ini yang memiliki pendapatan rendah, sehingga anak-anak sering kali terpaksa bekerja. Di Pekalongan Utara, faktor ekonomi dan akses ke sekolah yang cukup jauh menjadi tantangan utama. Banyak keluarga di wilayah pesisir yang lebih mengutamakan anak-anak mereka untuk bekerja daripada bersekolah. Selain itu, jarak sekolah yang cukup jauh untuk anak-anak yang tinggal di daerah pesisir ini bisa mengurangi minat mereka untuk terus bersekolah.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan, antara lain:

- a) **Subsidi Transportasi atau Fasilitas Transportasi Sekolah**  
Program subsidi transportasi atau penyediaan bus sekolah di daerah-daerah dengan akses terbatas akan membantu mengatasi kendala jarak. Program ini bisa dirancang untuk anak-anak di kelurahan seperti Panjang Wetan dan Krapyak.
- b) **Program Pengembangan Ekonomi untuk Keluarga Nelayan**  
Pelatihan dan program pengembangan ekonomi untuk keluarga nelayan atau yang bergantung pada pekerjaan informal dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga anak-anak tidak perlu bekerja dan dapat tetap bersekolah.
- c) **Edukasi Pentingnya Pendidikan melalui Organisasi Lokal**  
Program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat setempat, seperti nelayan senior atau ketua RT/RW, dapat membantu meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Kampanye dengan sasaran orang tua di wilayah pesisir bisa membantu mengubah persepsi tentang pendidikan.

#### 4. Kecamatan Pekalongan Selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan mencatat 270 anak ATS, dengan jumlah tertinggi berada di Jenggot (73 anak), Banyurip (56 anak), Kuripan Yosorejo (51 anak), Buaran Kradenan (40 anak), Kuripan Kertoharjo (29 anak), dan Sokoduwet (21 anak). Kecamatan ini memiliki karakteristik masyarakat dengan latar belakang yang lebih beragam serta beberapa daerah dengan akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan kecamatan lain. Di wilayah ini, masalah sosial dan budaya, seperti pola pikir orang tua yang cenderung tidak memprioritaskan pendidikan, menjadi penyebab utama ATS. Beberapa keluarga mungkin merasa bahwa pendidikan tidak terlalu penting untuk masa depan anak-anak mereka atau kurang memiliki pemahaman akan manfaat pendidikan jangka panjang.

Adapun bentuk intervensi dan rekomendasi yang bisa dilakukan antara lain:

- Program Penyuluhan Berbasis Keluarga dan Komunitas  
Penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan sangat diperlukan. Melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dapat membantu mengubah pola pikir keluarga yang kurang mendukung pendidikan.
- Program Pengembangan Kapasitas untuk Anak-Anak  
Melalui program pengembangan kapasitas seperti pelatihan keterampilan, anak-anak di Pekalongan Selatan dapat mendapatkan keterampilan tambahan tanpa meninggalkan pendidikan formal. Program ini juga dapat disinergikan dengan dunia industri lokal untuk memberikan kesempatan magang kepada siswa.
- Pengembangan Fasilitas Sekolah dan Program Pendidikan Alternatif  
Untuk menarik minat anak-anak, fasilitas sekolah perlu ditingkatkan. Program pendidikan alternatif seperti kelas sore atau kejar paket untuk anak-anak yang terpaksa bekerja juga bisa menjadi solusi agar mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan.

#### B. Aspek-Aspek Penting Penyebab ATS di Kota Pekalongan

Kondisi ATS di Kota Pekalongan merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh beragam faktor kewilayahan dan aspek-aspek sosio-ekonomi yang berbeda di tiap kecamatan. Kota Pekalongan sendiri terbagi ke dalam beberapa wilayah administratif dengan karakteristik dan tantangan tersendiri terkait pendidikan anak-anak usia sekolah. Berdasarkan kajian awal, terdapat disparitas tingkat ATS di antara wilayah-wilayah tersebut, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut tergambarkan pada beberapa tabel dibawah ini, dimulai dari Tabel 5.2 penyebab ATS berdasarkan aspek ekonomi, kemudian Tabel 5.3 penyebab ATS berdasarkan aspek budaya, Tabel 5.4 penyebab ATS berdasarkan aspek sosial, serta Tabel 5.5 penyebab ATS berdasarkan aspek layanan/fasilitas/sarana dan prasarana.

##### 1. Aspek Ekonomi

Pada tabel 4, penyebab terbesar ATS di Kota Pekalongan disebabkan oleh dorongan untuk harus bekerja dengan angka 37.85% bagi laki-laki dan 31.31% bagi perempuan. Hal ini bisa diartikan bahwa, di Kota Pekalongan, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan, terutama disebabkan oleh keharusan mereka untuk bekerja demi membantu pendapatan keluarga. Fenomena ini umum terjadi di kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, di mana anak-anak sering kali dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja keluarga. Sebagai kota dengan sektor industri dan kerajinan yang berkembang, seperti batik dan kerajinan tekstil, Kota Pekalongan menciptakan peluang kerja informal yang mudah diakses oleh anak-anak, sehingga banyak dari mereka akhirnya terjun ke dunia kerja sejak dini.

**Tabel 4. Analisis Penyebab ATS Berdasarkan**

##### Aspek Ekonomi

Analisis Penyebab Anak Tidak Sekolah Aspek Ekonomi					Laki-laki					Perempuan				
No	Aspek Ekonomi	Jumlah	Persen	Lihat	No	Aspek Ekonomi	Jumlah	Persen	Lihat	No	Aspek Ekonomi	Jumlah	Persen	Lihat
1.	Harus Bekerja	67	37.85%		1.	Tidak Mampu Membayar Sekolah	39	39.39%		1.	Harus Bekerja	31	31.31%	
2.	Tidak Mampu Membayar Sekolah	62	35.03%		2.	Biaya Operasional Pribadi	44	24.86%		2.	Tidak Ada Masalah	3	3.03%	
3.	Biaya Operasional Pribadi	44	24.86%		3.	Tidak Ada Masalah	4	2.20%						
4.	Tidak Ada Masalah	4	2.20%											

Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan karena keharusan bekerja adalah masalah yang kompleks dan terkait erat dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Di Kota Pekalongan, upaya untuk mengatasi ATS perlu dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup intervensi ekonomi, pendidikan nonformal, dan kesadaran masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas, diharapkan anak-anak di Kota Pekalongan dapat kembali menikmati hak pendidikan mereka, membangun masa depan yang lebih baik, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut ini adalah beberapa aspek penyebab anak tidak sekolah karena harus bekerja, beserta analisis mendalam mengenai kondisi yang ada:

- 1) Faktor Ekonomi dan Ketergantungan Keluarga terhadap Penghasilan Tambahan  
Ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghasilan tambahan dari anak membuat pendidikan anak menjadi kurang prioritas. Meskipun pendidikan adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, tekanan ekonomi sering kali mendorong keluarga untuk mengambil jalan pintas dengan mempekerjakan anak-anak, yang pada akhirnya mengorbankan masa depan mereka dalam jangka panjang. Banyak keluarga di Kota Pekalongan yang memiliki penghasilan rendah, terutama mereka yang bekerja di sektor informal sebagai buruh harian. Dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, anak-anak sering kali dilibatkan dalam aktivitas ekonomi untuk menambah pendapatan keluarga. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup, terutama dalam hal pangan, kesehatan, dan tempat tinggal, orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung melihat pendidikan sebagai kebutuhan sekunder. Anak-anak pun terpaksa bekerja, baik di rumah tangga maupun di sektor industri, untuk membantu meringankan beban keluarga.
- 2) Peluang Kerja di Sektor Industri dan Kerajinan Lokal

Keberadaan industri lokal yang memiliki keterkaitan budaya, seperti batik, memperkuat alasan bagi orang tua untuk mengikutsertakan anak dalam pekerjaan tersebut. Keterlibatan anak dalam pekerjaan ini juga dianggap sebagai warisan keterampilan keluarga. Namun, hal ini justru memutus akses anak-anak terhadap pendidikan formal yang lebih diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

Kota Pekalongan dikenal sebagai Kota Batik dengan banyaknya industri kecil hingga menengah yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Anak-anak sering kali dipekerjakan di industri ini karena pekerjaan batik dianggap ringan dan bisa dilakukan dengan cepat setelah anak belajar teknik dasarnya. Orang tua melihat pekerjaan ini sebagai alternatif yang lebih produktif daripada pendidikan. Selain batik, sektor tekstil dan kerajinan lain juga menyerap tenaga kerja anak-anak karena pekerjaan ini bisa dilakukan di rumah dan tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Banyak anak yang membantu dalam proses pengerjaan kain, pengemasan, dan penjualan produk, yang menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi keluarga.

- 3) Pandangan Sosial dan Budaya yang Mendukung Anak Bekerja

Pandangan sosial yang mendukung anak bekerja menunjukkan adanya nilai budaya yang mengutamakan kontribusi anak dalam pendapatan keluarga. Pemahaman yang terbatas terhadap nilai pendidikan mengakibatkan orang tua lebih memilih keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan dengan potensi peningkatan kesejahteraan jangka panjang melalui pendidikan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kesadaran pendidikan di kalangan masyarakat ekonomi rendah.

Dalam budaya tertentu, anak-anak dianggap sebagai aset ekonomi yang harus turut berkontribusi pada penghasilan keluarga. Orang tua dengan kondisi ekonomi yang sulit sering kali memandang keterlibatan



anak-anak dalam pekerjaan sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Anak-anak yang tidak bekerja malah dianggap kurang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Di kalangan masyarakat yang kurang berpendidikan, pentingnya pendidikan jangka panjang bagi masa depan anak sering kali kurang dipahami. Sebaliknya, orang tua lebih fokus pada kebutuhan ekonomi jangka pendek, sehingga anak-anak diikutsertakan dalam pekerjaan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

4) Tekanan Ekonomi

Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang membuat anak-anak yang sudah bekerja sulit untuk kembali ke pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan keluarga terhadap penghasilan anak, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan pendidikannya di masa mendatang. Banyak keluarga, terutama yang bekerja di sektor informal, menghadapi ketidakstabilan pendapatan sehingga mendorong anak untuk ikut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Situasi ini membuat sebagian anak terbiasa menghasilkan uang sendiri, sehingga minat untuk kembali bersekolah berkurang. Jika tidak ditangani secara serius, kecenderungan tersebut dapat menjadi ancaman nyata bagi upaya penuntasan pendidikan dasar bagi semua anak.

Adapun Rekomendasi Kebijakan untuk Penanganan ATS karena Keharusan Bekerja, diantaranya:

- 1) Program Bantuan Ekonomi untuk Keluarga Rentan  
Program bantuan ekonomi yang ditargetkan kepada keluarga dengan anak berisiko putus sekolah dapat membantu mengurangi ketergantungan ekonomi pada anak. Bantuan ini dapat berupa dukungan modal usaha atau program pengembangan ekonomi yang memungkinkan orang tua mendapatkan penghasilan tambahan.
- 2) Penyediaan Pendidikan Nonformal yang

Fleksibel

Program pendidikan nonformal, seperti kejar paket atau sekolah malam, dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang sudah bekerja tetapi ingin tetap mendapatkan pendidikan. Dengan fleksibilitas waktu dan lokasi, pendidikan nonformal dapat lebih mudah diakses oleh anak-anak yang bekerja.

- 3) Penyuluhan tentang Pentingnya Pendidikan  
Program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Pendekatan budaya yang menekankan manfaat pendidikan untuk masa depan anak akan menjadi langkah efektif dalam mendorong kesadaran.

4) Perbaikan Akses Pendidikan dan Dukungan Biaya

Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah dengan akses terbatas, dan memastikan bantuan biaya sekolah mencakup kebutuhan pendidikan yang lebih komprehensif. Hal ini akan membantu mengurangi kendala ekonomi bagi keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak.

**2. Aspek Budaya**

Tabel 5 menggambarkan bahwa kondisi ATS di Kota Pekalongan menghadapi permasalahan yang cukup kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya dan sosial ekonomi. Sebagai kota yang dikenal dengan industrinya, khususnya batik dan kerajinan, Kota Pekalongan menawarkan sejumlah peluang kerja bagi masyarakat setempat, termasuk bagi anak-anak. Di balik peluang ini, ada tantangan yang membuat anak-anak di Kota Pekalongan terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan memilih untuk bekerja. Berdasarkan analisis aspek budaya yang dilakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi alasan anak-anak di Kota Pekalongan tidak bersekolah, seperti kurangnya motivasi, keinginan untuk bebas, pola pikir orang tua, serta faktor-faktor lainnya.

**Tabel 5. Analisis Penyebab ATS Berdasarkan Aspek Budaya**



Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Analisis ini menunjukkan bahwa faktor budaya, ekonomi, dan pola pikir yang ada di Kota Pekalongan memiliki pengaruh signifikan terhadap masalah ATS. Lingkungan yang memberi peluang kerja pada usia muda, pola pikir pragmatis orang tua, serta kurangnya motivasi dari anak-anak menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berbasis budaya untuk menangani masalah ATS di Kota Pekalongan. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor industri, Kota Pekalongan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung kesejahteraan generasi mendatang. Adapun gambaran umumnya sebagai berikut.

- 1) Kurangnya Motivasi sebagai Faktor Utama di Lingkungan Kota Pekalongan  
Kurangnya motivasi menjadi faktor dominan di antara anak-anak yang tidak bersekolah di Kota Pekalongan, baik laki-laki maupun perempuan. Pada anak laki-laki, sebanyak 135 anak (55,56%) menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan, sementara pada anak perempuan, ada 48 anak (52,75%) yang juga mengalami kendala motivasi. Lingkungan di Kota Pekalongan yang kental dengan budaya kerja di industri kerajinan, terutama industri batik, bisa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya motivasi ini. Anak-anak mungkin melihat bahwa bekerja di industri tersebut memberikan penghasilan langsung yang mereka anggap lebih bermanfaat daripada mengikuti pendidikan formal. Minimnya peran model inspiratif yang menunjukkan manfaat pendidikan jangka panjang juga menjadi tantangan di masyarakat Kota Pekalongan, di mana anak-anak tidak banyak mendapatkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan dari lingkungan sekitarnya.

- 2) Keinginan untuk Bebas dan Implikasinya dalam Konteks Sosial Pekalongan  
Keinginan anak-anak untuk bebas menjadi faktor signifikan kedua yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolah. Sebanyak 84 anak laki-laki (34,57%) dan 27 anak perempuan (29,67%) menyatakan bahwa mereka lebih memilih kebebasan daripada terikat dengan aturan dan rutinitas sekolah. Di Kota Pekalongan, hal ini sering kali terkait dengan budaya lokal di mana anak-anak, terutama remaja, mulai bekerja di usia dini untuk mencari pengalaman atau mendukung ekonomi keluarga. Mereka merasa bahwa bekerja memberikan mereka otonomi dan kedewasaan yang dihargai dalam masyarakat sekitar. Keinginan untuk bebas ini mungkin juga dipicu oleh kurangnya fasilitas atau kegiatan yang menarik di sekolah, sehingga anak-anak merasa kurang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Dalam lingkungan yang memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bekerja sejak usia dini, kebebasan ini justru dianggap sebagai bagian dari perkembangan sosial mereka, meskipun mengorbankan pendidikan formal.
- 3) Pengaruh Pola Pikir Orang Tua di Masyarakat Pekalongan  
Pola pikir orang tua di Kota Pekalongan memainkan peran penting dalam keputusan anak untuk berhenti sekolah. Sebanyak 21 anak laki-laki (8,64%) dan 15 anak perempuan (16,48%) menunjukkan bahwa pola pikir orang tua yang kurang mendukung pendidikan menjadi salah satu alasan utama mereka tidak bersekolah. Dalam beberapa keluarga di Kota Pekalongan, pendidikan formal masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak esensial, terutama jika orang tua sendiri tidak memiliki pengalaman pendidikan yang tinggi. Bagi sebagian orang tua, keterampilan praktis seperti bekerja di industri batik atau kerajinan tekstil dianggap lebih relevan dan memberikan manfaat ekonomi langsung. Ketidakmampuan ekonomi dan pandangan pragmatis terhadap pendidikan membuat

orang tua lebih mendorong anak-anak mereka untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan formal, terutama jika pendidikan tersebut dianggap mahal atau tidak memberikan hasil nyata dalam waktu singkat.

4) Tidak Ada Masalah Signifikan pada Sebagian Kecil Anak

Meski jumlahnya kecil, terdapat beberapa anak di Kota Pekalongan yang tidak menghadapi kendala atau masalah tertentu yang menghalangi mereka untuk bersekolah. Pada kelompok ini, hanya 1,23% anak laki-laki dan 1,10% anak perempuan yang menyatakan bahwa mereka tidak bersekolah bukan karena adanya hambatan, tetapi lebih karena keputusan pribadi atau pengaruh lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian kecil anak memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena mereka merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang dimiliki atau karena telah mendapatkan pekerjaan yang dirasa mencukupi. Ini juga bisa menunjukkan adanya anak-anak yang merasa kurang termotivasi karena tidak melihat kebutuhan pendidikan formal dalam kehidupan sehari-hari di Kota Pekalongan.

Berdasarkan analisis penulis, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ATS di Kota Pekalongan, khususnya dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sosial ekonomi setempat, antara lain:

1) Penguatan Program Pendidikan Alternatif yang Fleksibel

Pemerintah Kota Pekalongan dapat mengembangkan program pendidikan alternatif seperti sekolah kejar paket, kelas malam, atau program pendidikan vokasi yang relevan dengan industri lokal. Misalnya, mengintegrasikan program pembelajaran yang mengajarkan keterampilan industri batik atau kerajinan sambil tetap memberikan pendidikan formal. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat tetap belajar tanpa harus melepaskan keterlibatan mereka dalam industri yang menghidupi banyak keluarga di Kota

Pekalongan.

2) Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan

Program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat membantu mengubah pola pikir orang tua mengenai pentingnya pendidikan. Edukasi bagi orang tua tentang manfaat pendidikan jangka panjang bagi masa depan anak mereka dapat mendorong perubahan perspektif, terutama bagi keluarga yang terbiasa melihat pendidikan sebagai hal yang kurang penting.

3) Pemberian Bantuan Ekonomi untuk Keluarga dengan Anak Rentan Putus Sekolah

Untuk mengurangi ketergantungan keluarga pada penghasilan tambahan dari anak-anak, Pemerintah Kota Pekalongan bisa memberikan bantuan ekonomi yang terarah bagi keluarga berpenghasilan rendah. Bantuan ini dapat berupa beasiswa, program bantuan pangan, atau modal usaha untuk keluarga, sehingga orang tua tidak merasa terpaksa melibatkan anak dalam pekerjaan demi menambah pendapatan keluarga.

4) Pengembangan Program Bimbingan Karir dan Motivasi bagi Anak-Anak di Sekolah

Program bimbingan karir yang menunjukkan peluang dan manfaat pendidikan tinggi dapat membantu meningkatkan motivasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Dengan menghadirkan pembicara tamu yang berhasil dalam berbagai bidang dan memberikan paparan tentang pentingnya pendidikan, anak-anak dapat memperoleh inspirasi dan motivasi baru untuk mengejar pendidikan.

5) Kolaborasi dengan Industri Lokal untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Pendidikan

Pemerintah Kota Pekalongan bisa bekerja sama dengan industri-industri lokal, seperti industri batik dan tekstil, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan pekerja. Dengan adanya komitmen dari pihak industri untuk memprioritaskan pekerja yang memiliki

pendidikan formal, keluarga-keluarga di Kota Pekalongan mungkin akan lebih termotivasi untuk mendukung anak-anak mereka bersekolah.

### 3. Aspek Sosial

Berdasarkan data yang ada pada Tabel 6, penyebab anak tidak sekolah dari aspek sosial di Kota Pekalongan diidentifikasi melalui beberapa faktor utama, yaitu pengaruh pergaulan, kondisi disabilitas, rasa malu atau enggan, kurangnya perhatian dan dukungan keluarga, serta faktor-faktor tambahan lainnya seperti pengalaman traumatik dan perundungan. Data ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, yakni anak laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan perbedaan dalam faktor-faktor yang memengaruhi mereka untuk tidak bersekolah.

**Tabel 6. Analisis Penyebab ATS Berdasarkan Aspek Sosial**

Analisis Penyebab Anak Tidak Sekolah Aspek Sosial					Laki-laki					Perempuan				
No	Aspek Sosial	Jumlah	Persen	Lihat	No	Aspek Sosial	Jumlah	Persen	Lihat	No	Aspek Sosial	Jumlah	Persen	Lihat
1.	Pergaulan	106	33,02%		1.	Dilabel	43	28,29%		1.	Dilabel	43	28,29%	
2.	Dilabel	67	20,87%		2.	Malu / Enggan	34	22,37%		2.	Malu / Enggan	34	22,37%	
3.	Malu / Enggan	61	19,00%		3.	Pergaulan	26	17,11%		3.	Pergaulan	26	17,11%	
4.	Kurang Perhatian / Dukungan Keluarga	49	15,26%		4.	Kurang Perhatian / Dukungan Keluarga	18	11,84%		4.	Kurang Perhatian / Dukungan Keluarga	18	11,84%	
5.	Traumatik	15	4,67%		5.	Menikah	12	7,89%		5.	Menikah	12	7,89%	
6.	Perundungan/ Bullying	13	4,05%		6.	Perundungan/ Bullying	8	5,26%		6.	Perundungan/ Bullying	8	5,26%	

Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Kondisi anak tidak sekolah di Kota Pekalongan akibat faktor sosial menunjukkan kompleksitas yang memerlukan intervensi dari berbagai pihak. Faktor pergaulan, disabilitas, rasa malu, kurangnya perhatian keluarga, pengalaman traumatik, dan pernikahan dini merupakan tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk terus bersekolah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas, Kota Pekalongan dapat mengurangi angka ATS dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Berikut analisis lebih rinci mengenai faktor-faktor sosial tersebut di Kota Pekalongan, di antaranya:

- 1) Pengaruh Pergaulan sebagai Faktor Utama bagi Anak Laki-Laki  
Pada anak laki-laki di Kota Pekalongan, pergaulan menjadi faktor dominan yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolah, dengan 106 anak (33,02%)

menyebutkan pengaruh teman sebaya sebagai alasan utama. Kota Pekalongan, yang memiliki lingkungan industri dan budaya kerja informal, mungkin menciptakan ruang sosial di mana anak-anak laki-laki cenderung lebih terpapar pada pergaulan yang kurang mendukung pendidikan. Beberapa dari mereka mungkin merasa lebih terikat pada kelompok teman yang telah bekerja atau memilih kegiatan yang tidak terikat pada rutinitas sekolah. Kondisi ini menyoroti kebutuhan akan peran komunitas dan lembaga sosial untuk memfasilitasi lingkungan yang lebih positif dan mendukung pendidikan di kalangan remaja laki-laki.

- 2) Kondisi Disabilitas sebagai Faktor Dominan bagi Anak Perempuan

Untuk anak perempuan di Kota Pekalongan, kondisi disabilitas muncul sebagai penyebab utama tidak bersekolah, dengan 43 anak (28,29%) yang menyatakan bahwa keterbatasan fisik atau mental menjadi penghalang. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan dengan disabilitas di Kota Pekalongan mungkin menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengakses pendidikan. Minimnya fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas serta kurangnya dukungan khusus di sekolah-sekolah umum dapat memperparah kondisi ini. Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas mungkin masih kuat, membuat keluarga enggan untuk mendorong anak perempuan mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental untuk melanjutkan pendidikan formal.

- 3) Rasa Malu atau Enggan

Rasa malu atau enggan menjadi alasan ketiga yang signifikan bagi anak-anak tidak bersekolah di Kota Pekalongan. Sebanyak 61 anak laki-laki (19,00%) dan 34 anak perempuan (22,37%) merasa malu atau enggan untuk bersekolah. Faktor ini bisa terkait dengan beberapa hal, seperti ketidakpercayaan diri, kesulitan bersosialisasi, atau bahkan stigma sosial tertentu. Misalnya, anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah mungkin merasa malu untuk bersekolah karena merasa

- kurang mampu bersaing dengan teman-teman mereka. Hal ini menyoroti pentingnya program dukungan sosial dan konseling di sekolah-sekolah yang dapat membantu anak-anak membangun rasa percaya diri dan mengatasi rasa malu atau cemas terkait lingkungan sekolah.
- 4) Kurangnya Perhatian atau Dukungan Keluarga  
Kurangnya perhatian dan dukungan keluarga juga menjadi faktor penting yang menyebabkan anak-anak di Kota Pekalongan tidak melanjutkan pendidikan. Sebanyak 49 anak laki-laki (15,26%) dan 18 anak perempuan (11,84%) menyatakan kurangnya dukungan dari keluarga sebagai alasan mereka tidak bersekolah. Di Kota Pekalongan, terutama pada keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah atau orang tua yang sibuk bekerja di sektor informal, anak-anak sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk bersekolah. Orang tua mungkin lebih fokus pada kebutuhan ekonomi sehari-hari daripada mendukung pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah atau organisasi sosial untuk memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.
  - 5) Pengalaman Traumatik dan Perundungan  
Meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan faktor lain, pengalaman traumatik dan perundungan tetap menjadi penyebab anak tidak bersekolah. Sebanyak 15 anak laki-laki (4,67%) mengalami pengalaman traumatik, dan 13 anak laki-laki (4,05%) mengalami perundungan atau bullying. Di sisi perempuan, sebanyak 8 anak (5,26%) menyatakan perundungan sebagai alasan mereka meninggalkan sekolah. Kota Pekalongan, seperti banyak kota lain, mungkin memiliki kasus perundungan yang belum terpantau dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan trauma dan perundungan perlu ditingkatkan melalui program dukungan psikologis di sekolah-sekolah. Pendekatan yang sensitif dan efektif dalam menangani anak-anak yang mengalami trauma atau perundungan dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk tetap bersekolah.
  - 6) Pernikahan Dini pada Anak Perempuan  
Di antara anak perempuan, pernikahan dini menjadi salah satu penyebab yang cukup signifikan, dengan 12 anak (7,89%) menyatakan bahwa mereka meninggalkan sekolah karena telah menikah. Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan terkait pernikahan dini, yang sering kali didorong oleh faktor ekonomi atau tekanan sosial. Pernikahan dini di kalangan anak perempuan ini sangat mempengaruhi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, diperlukan program penyuluhan dan kebijakan perlindungan yang lebih kuat untuk mencegah pernikahan dini serta memberikan peluang bagi anak perempuan untuk terus bersekolah.
- Berdasarkan analisis faktor sosial penyebab anak tidak sekolah di Kota Pekalongan, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini, antara lain:
- 1) Penguatan Program Konseling dan Dukungan Psikologis  
Sekolah-sekolah di Kota Pekalongan perlu menyediakan program konseling yang khusus menangani kasus anak yang mengalami rasa malu, trauma, atau perundungan. Dukungan ini dapat membantu anak-anak untuk mengatasi masalah psikologis mereka dan merasa lebih nyaman di lingkungan sekolah.
  - 2) Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas untuk Anak Disabilitas  
Pemerintah Kota Pekalongan perlu memperhatikan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas agar anak-anak dengan keterbatasan fisik atau mental dapat bersekolah dengan nyaman. Penyediaan fasilitas aksesibilitas dan pelatihan bagi guru untuk menangani anak disabilitas akan membantu mengurangi angka ATS di kalangan anak disabilitas.
  - 3) Penyuluhan dan Pendidikan tentang Pentingnya Dukungan Keluarga



Program penyuluhan yang melibatkan orang tua sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran penting keluarga dalam mendukung pendidikan anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih kuat kepada anak-anak mereka.

- 4) Pencegahan Pernikahan Dini melalui Program Kesadaran Sosial  
Program kesadaran sosial mengenai dampak negatif pernikahan dini harus ditingkatkan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama, pemerintah Kota Pekalongan dapat memberikan edukasi kepada keluarga dan anak-anak perempuan tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan.
- 5) Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk Anak-Anak yang Terkena Pengaruh Pergaulan Negatif  
Pembentukan kelompok dukungan yang melibatkan remaja-remaja di Kota Pekalongan dapat membantu anak-anak yang terdampak pengaruh pergaulan untuk kembali termotivasi dalam bersekolah. Kelompok ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan sosial dan budaya yang positif, sehingga anak-anak mendapatkan alternatif pergaulan yang lebih sehat dan mendukung pendidikan.

#### **4. Aspek Layanan**

Berdasarkan data di Kota Pekalongan yang ada pada tabel 7, terdapat beberapa aspek layanan pendidikan yang memengaruhi keputusan anak-anak untuk tidak melanjutkan sekolah. Analisis dari aspek layanan ini mencakup faktor-faktor seperti jarak sekolah, ketersediaan fasilitas sekolah, dan persepsi terkait akses pendidikan. Secara umum, meskipun sebagian besar anak di Kota Pekalongan tidak menyebutkan adanya kendala layanan sebagai alasan utama mereka tidak bersekolah, beberapa anak masih menghadapi kesulitan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak terkait.

**Tabel 7. Analisis Penyebab ATS Berdasarkan Aspek Layanan**

Analisis Penyebab Anak Tidak Sekolah Aspek Layanan									
Laki-laki					Perempuan				
No	Aspek Layanan	Jumlah	Persen	Lihat	No	Aspek Layanan	Jumlah	Persen	Lihat
1.	Tidak Ada Masalah	17	77,27%		1.	Tidak Ada Masalah	15	88,89%	
2.	Jarak Sekolah Jauh	4	18,18%		2.	Jarak Sekolah Jauh	2	11,11%	
3.	Kurangnya Fasilitas Sekolah	1	4,55%						

Sumber: <https://tuntas.pekalongankota.go.id>

Analisis ini menunjukkan bahwa aspek layanan pendidikan di Kota Pekalongan, terutama terkait jarak sekolah dan ketersediaan fasilitas, menjadi faktor yang mempengaruhi sebagian kecil anak dalam melanjutkan pendidikan. Meskipun sebagian besar anak tidak melihat layanan pendidikan sebagai hambatan utama, tantangan ini tetap relevan, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan suburban. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, serta memberikan dukungan tambahan bagi keluarga di wilayah-wilayah yang lebih terpencil. Berikut adalah analisis mendalam terhadap setiap aspek layanan yang relevan di Kota Pekalongan, antara lain:

##### **1) Tidak Ada Masalah yang Menghambat Akses Layanan Pendidikan**

Dari data yang diperoleh, mayoritas anak-anak yang tidak bersekolah menyatakan bahwa mereka tidak menghadapi masalah terkait aspek layanan pendidikan. Sebanyak 77,27% anak laki-laki dan 88,89% anak perempuan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hambatan dalam hal jarak sekolah atau fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar anak-anak di Kota Pekalongan, aspek layanan pendidikan bukanlah faktor utama yang mencegah mereka untuk melanjutkan sekolah.

Fakta bahwa sebagian besar anak tidak menyebutkan layanan pendidikan sebagai penghambat mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti aspek sosial, budaya, atau ekonomi, mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam memengaruhi keputusan mereka untuk meninggalkan bangku sekolah. Kota Pekalongan sendiri merupakan kota dengan infrastruktur pendidikan yang cukup memadai di pusat kota, sehingga bagi anak-anak yang tinggal

di sekitar pusat kota, akses ke sekolah relatif mudah dijangkau. Namun, meskipun aspek layanan tidak menjadi kendala utama, penting untuk melihat faktor-faktor eksternal lainnya yang memengaruhi minat anak untuk bersekolah, seperti motivasi pribadi, dukungan keluarga, atau pengaruh lingkungan.

- 2) Jarak Sekolah yang Jauh sebagai Kendala Sebagian kecil anak, terutama yang tinggal di daerah suburban atau daerah yang jauh dari akses pusat Kota Pekalongan, menyebutkan bahwa jarak sekolah yang jauh menjadi hambatan dalam melanjutkan pendidikan. Sebanyak 18,18% anak laki-laki dan 11,11% anak perempuan mengalami kesulitan untuk mencapai sekolah akibat jarak yang terlalu jauh. Jarak sekolah yang jauh ini seringkali menjadi alasan bagi keluarga untuk tidak mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai atau bagi keluarga yang tidak mampu membiayai transportasi harian. Kota Pekalongan memiliki wilayah-wilayah yang cukup beragam, termasuk area urban yang padat dan area suburban yang lebih jauh dari pusat akses. Di daerah suburban, infrastruktur transportasi mungkin belum cukup memadai untuk menjangkau sekolah-sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggal anak-anak. Anak-anak yang tinggal di daerah ini mungkin harus menempuh perjalanan cukup lama untuk sampai ke sekolah, yang secara langsung mengurangi motivasi mereka untuk terus bersekolah. Selain itu, keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam membiayai transportasi anak-anak mereka ke sekolah. Hal ini diperparah jika transportasi umum yang ada tidak efisien atau tidak terjangkau bagi siswa. Di sisi lain, bagi beberapa anak laki-laki, jarak yang jauh sering kali membuat mereka lebih memilih bekerja di sekitar lingkungan tempat tinggal, sehingga meninggalkan sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam kasus ini,

intervensi dari pihak pemerintah berupa subsidi transportasi atau penyediaan angkutan khusus sekolah dapat menjadi solusi efektif untuk membantu mengatasi masalah jarak ini.

- 3) Kurangnya Fasilitas Sekolah sebagai Kendala Minor tetapi Bermakna Meskipun hanya 4,55% anak laki-laki yang menyebutkan kurangnya fasilitas sekolah sebagai hambatan, faktor ini tetap relevan dan perlu mendapatkan perhatian. Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan teknologi, dapat memengaruhi kenyamanan dan kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Anak-anak yang merasa bahwa fasilitas di sekolah tidak memadai mungkin kehilangan minat untuk bersekolah dan lebih memilih untuk bekerja atau melakukan aktivitas lain yang dianggap lebih produktif. Fasilitas sekolah yang kurang lengkap sering kali membuat pengalaman belajar menjadi kurang menarik dan tidak mendukung proses pembelajaran yang efektif. Di beberapa sekolah yang berada di daerah suburban Kota Pekalongan, sarana dan prasarana yang tersedia mungkin terbatas dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pusat kota. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di wilayah tersebut. Ketidakseimbangan fasilitas ini juga dapat membuat anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah merasa tertinggal atau kurang berdaya saing dengan teman-teman sebaya yang bersekolah di tempat dengan fasilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, investasi dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di seluruh wilayah Kota Pekalongan akan sangat membantu meningkatkan minat anak-anak untuk tetap bersekolah.

Berdasarkan analisis terhadap data ini, beberapa rekomendasi kebijakan berikut dapat diimplementasikan oleh pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi kendala-kendala layanan pendidikan dan mendorong lebih banyak anak untuk melanjutkan sekolah.

Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan yang telah disebutkan, diharapkan Kota Pekalongan dapat mengurangi kendala yang dihadapi anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan. Pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan keluarga akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk tetap bersekolah dan mencapai potensi mereka. Dukungan yang tepat dapat membuat pendidikan lebih inklusif dan merata, serta membantu mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Kota Pekalongan.

Adapun bentuk rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kendala layanan pendidikan di Kota Pekalongan, antara lain:

- 1) **Pengadaan Transportasi Sekolah**  
Pemerintah Kota Pekalongan dapat menyediakan transportasi khusus untuk anak-anak yang tinggal di daerah yang jauh dari sekolah. Program ini dapat berupa bus sekolah yang beroperasi di daerah-daerah dengan akses terbatas, sehingga anak-anak di wilayah suburban dapat dengan mudah mencapai sekolah tanpa harus menanggung biaya tambahan. Alternatif lainnya adalah memberikan subsidi transportasi bagi siswa yang tinggal jauh, terutama bagi keluarga dengan ekonomi rendah.
- 2) **Program Edukasi tentang Pentingnya Pendidikan**  
Program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pendidikan, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak keluarga di daerah yang jauh dari pusat pendidikan yang mungkin memandang pendidikan sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting karena terbatasnya akses dan fasilitas. Dengan program edukasi, diharapkan pandangan ini bisa berubah, dan keluarga-keluarga lebih mendukung anak-anak mereka untuk tetap bersekolah.
- 3) **Kolaborasi dengan Komunitas Lokal (Sosial-Keagamaan) untuk Meningkatkan Akses Pendidikan**  
Pemerintah Kota Pekalongan dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk

menyediakan solusi yang tepat sasaran, seperti program belajar di rumah atau dukungan masyarakat bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah, seperti pelibatan PKBM, Pondok Pesantren atau komunitas lain yang relevan. Kolaborasi ini dapat melibatkan masyarakat setempat, organisasi nonpemerintah, dan pihak swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, permasalahan ATS di Kota Pekalongan memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tantangan kewilayahan di setiap kecamatan. Melalui implementasi rekomendasi yang terfokus pada penyelesaian kendala ekonomi, aksesibilitas pendidikan, motivasi belajar, dan pola pikir keluarga, diharapkan angka ATS di Kota Pekalongan dapat berkurang secara signifikan. Program intervensi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah hingga keluarga, akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan bagi setiap anak, serta memastikan bahwa hak pendidikan dapat diakses oleh seluruh anak di Kota Pekalongan. Kolaborasi dan komitmen dari semua pihak menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi ini, sehingga generasi muda Pekalongan dapat tumbuh dengan akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Hasil penelitian mengenai kajian ATS di Kota Pekalongan ini menunjukkan bahwa angka ATS mencapai 1.195 anak yang tersebar di empat kecamatan: Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik dan faktor penyebab ATS yang unik, mulai dari kendala ekonomi yang memaksa anak-anak untuk bekerja, pengaruh lingkungan dan motivasi belajar yang rendah, hingga aksesibilitas terhadap pendidikan yang terbatas. Faktor budaya juga berperan penting, di mana terdapat pandangan di beberapa keluarga yang kurang mendukung pendidikan formal bagi anak-anak mereka, menganggap bahwa

pendidikan bukan prioritas atau relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun kesimpulan sebagai bentuk rekomendasi untuk penguatan tata kelola penanganan dan pencegahan ATS, antara lain:

1. Perlunya penguatan kolaborasi penanganan ATS multipihak dengan pelibatan pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta memastikan pemahaman tugas dan fungsi antarlevel pemerintah. Agar meningkatkan kolaborasi multisektor dilakukan melalui pelibatan yang lebih intensif dari kecamatan dan kelurahan, serta memastikan tugas pokok dan fungsi masing-masing dilakukan melalui refleksi dan inovasi yang berkelanjutan, agar gerakan pengembalian ATS selalu menyesuaikan dengan keragaman konteks lokal.
2. Penekanan pada upaya penting penanganan ATS, yaitu pada sistem manajemen data ATS, termasuk data ATS penyandang disabilitas. Proses pengelolaan data pada saat pendataan (data awal), rekonfirmasi (*update* per tahun), dan monitoring ATS (*update* per semester) harus melibatkan pemerintah kelurahan untuk memastikan akurasi data.
3. Karena proses pengembalian ATS ke bangku sekolah adalah hasil antara, disarankan agar penguatan monitoring ATS yang sudah kembali bersekolah terus dilakukan sampai anak tersebut menamatkan pendidikannya. Untuk efisiensi waktu dan biaya, proses pendataan dan konfirmasi kemauan ATS bersekolah dapat didesain untuk terintegrasi dalam satu tahapan sensus pada awal inovasi. Hal ini akan mempermudah proses penargetan pengembalian ATS ke sistem persekolahan dan advokasi untuk penganggarannya.
4. Perlunya penyajian sistem manajemen data ATS berbasis teknologi sebagai upaya efektivitas, efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Agar terus mengoptimalkan sistem manajemen data ATS yang akurat berbasis teknologi, termasuk untuk data ATS penyandang disabilitas. Adopsi teknologi pendataan yang murah tapi

efisien berbasis web dan android harus dapat diakses oleh publik dan multiaktor, termasuk sekolah dan PKBM penerima ATS yang kembali bersekolah.

5. Penguatan regulasi masih dibutuhkan untuk memastikan harmonisasi kebijakan dari pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan untuk menjamin penyediaan pendanaan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
6. Agar dilakukan penguatan layanan sekolah inklusi melalui penguatan regulasi, perekrutan guru untuk mengajar anak dengan disabilitas, investasi pada sarana fisik sekolah inklusi yang ramah bagi disabilitas anak, serta advokasi luas baik pada anak sekolah, ATS, maupun orang tua.
7. Mendata inisiatif-inisiatif lokal pencegahan yang ada, untuk kemudian diperbesar skalanya dan dilembagakan di bawah kepemimpinan Bapperida dan Dinas Pendidikan. Dengan begitu dukungan pendanaan dari APBD pemerintah kota dan sumber dana lain akan lebih mudah didapatkan.
8. Aspek tata kelola yang wajib tersedia dalam pengembangan upaya inovasi adalah hal-hal berikut ini:
  - a. Regulasi
  - b. Anggaran
  - c. Struktur kelembagaan
  - d. Mekanisme pelaksanaan
  - e. Sistem pendataan anak rentan putus sekolah dan ATS yang inklusif.

## 5. REFERENSI

- Ali, N. B. V. (2011). Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. *Jurnal Pendidikan & Kebudayaan*, (17)1, 43-55.
- Anas, Y., & Elfindri. (2009). Strategi penuntasan program wajib belajar sembilan tahun pada level rumah tangga di kabupaten pasaman. *Jurnal FE Unand*, 9(3), 23-35.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum03>

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia*.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. (2024). *Buku Panduan Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024*.
- Bitterman, P., & Koliba, C. J. (2020). Modeling alternative collaborative governance network designs: an agent-based model of water governance in the lake champlain basin, vermont. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 636–655. <https://doi.org/10.1093/jopart/muua01>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*.
- Daliyo et. al. (1998). *Pekerja Anak dan Perencanaan Pendidikan di Nusa Tenggara Barat dan Timur*. Policy Paper No. 7.
- Duranti, A. (1997). *Lingusitic Anthropology*.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*.
- Fathul, K. (2006). *Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah pada Tingkat SMP Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2005*.
- Fitriana, Nur Itsnaini. (2015). *Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah di Sekolah Dasar Kota Yogyakarta*.
- Haskins, R. (2013). *Three Simple Rules Poor Teens Should Follow to Join The Middle Class*. Diakses melalui <https://www.brookings.edu/opinions/three-simple-rules-poor-teens-should-follow-to-join-the-middle-class/>
- Hammersley, M. and Atkinson, P. (2007). *Ethnography Principles in Practice*.
- Hasanah, Y. M., & Safruddin. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah kota yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228–239.
- Irwanto. (2017). *Risk and Benefit of Early Age Schooling In: The Impact of Lifestyle Modernization in Child Health Services*
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*.
- Malik, H. K., & Sumarno, S. (2016). Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak untuk menyelesaikan program wajar 9 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8061>.
- Mujiati, M., Nasir, N., & Ashari, A. (2018). Faktor-faktor penyebab siswa putus sekolah. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 18(3), 271–281. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v18i3.1870>.
- Murnane, R. J. (2013). U.S. High school graduation rates: patterns and explanations. *Journal of Economic Literature* 2013, 51(2), 370–422.
- Pacheco-Vega, R., & Parizeau, K. (2018). Doubly engaged ethnography: opportunities and challenges when working with vulnerable communities. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1). Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1609406918790653>
- Purnomo, A. S. (2009). *Faktor-faktor Penyebab Anak Usia Sekolah Tidak Menyelesaikan Pendidikan Dasar*.
- Shabri. (2014). Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di aceh. *Jurnal Pencerahan Majelis Pendidikan Daerah Aceh*, 8(1), 15-37.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Etnografi*.
- TUNTAS. (2024). Bappeda bersama United Nations Children's Fund (UNICEF). Diakses melalui <https://tuntas.pekalongankota.go.id/halamanawal.php>, pada tanggal 24 Oktober 2024.